

MODEL PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS PERTANIAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PASCA PEMEKARAN

TUGAS AKHIR

Oleh:

S O L I H I N

L2D302385



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2 0 0 4

ABSTRACT

The development paradigm in Indonesia has transformed from the centralistic model to the decentralist development system since legalized of UU No.22 Year 1999 and UU No.25 Year 1999 had been revised by UU No.32 and 33 Year 2004 about power sharing and financial sharing, that concern on potency and locally initiative (Arsyad, 1999: 119). This phenomenon had been followed by the regional blooming and development process that according to the PP No.29 Year 2000. The bloomed regency had to be a survive region that can prove the acceleration of development compared to the blooming process before.

That way also, since the blooming process at January 7th 2004, as new region, OKU Timur be claimed to develop it owned potency. Releasing the span of control will prove this region immediately to look for strategic development format. In this time the potency that exceed to OKU Timur regency is food crop agriculture and plantation. Therefore the agriculture development in OKU Timur become a requirement utilize to continue the development in this region.

This research use two analysis process; the first, analysis which as prologue utilize to go to the main analysis so that called as an pre-luminary analysis; second, the main analysis which have been adapted for the specification of research region and so that called as grand analysis. The pre-luminary analysis consists both of potency and problems analysis and commodity analysis. The potency and problems analysis produce core problem in the case study, whereas the commodity analysis besides yielding competitive and non-competitive sector also give the output of potential and dominant commodity type. The grand analysis consist of allocation and land capacity support analysis yielding eligibility of farm in supporting farmer life, whereas the pattern of produce and distribution analysis yield an weakness and excess of the agriculture activity pattern in OKU Timur regency. And so, the tendency investment analysis yield regulation system and arrangement of land ownership in this region.

Some effort of agriculture development in OKU Timur regency, among others the farm exploiting indication which have saturated especially wet farm agriculture so that wet farm agriculture labors there must be transforms to other effort field. Whereas the dry farming which be used for the agriculture activity has still wide. At the produce activity of agriculture pickings do not be found a processing to make up of product quality so that its value remains to lower, and then the multiplier effect which generated is so very small. The distribution pattern found the phenomenon of the role institute limited (BULOG) which only fulfilling local market, whereas private sector and buyers had been holding the regional market. Therefore the agriculture development model will be recommending an industrial processing to conduct on agriculture pickings in OKU Timur regency. Thereby there will be any multiplier effect to absorb the labor in the industrial sector, expected can excite the regional economic growth.

The result from this research is concern in the form of optimal agriculture activity development model pursuant to problems faced. The development model expected can become a reference of the development policies in OKU Timur Regency. Overall to return of blooming early target namely utilize to reach prosperity of OKU Timur society in later; then day.

Key words:

Model, agriculture based, OKU Timur, after blooming

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 (UU No.22/1999) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 (UU No.25/1999)¹ telah mempengaruhi perubahan paradigma pembangunan di Indonesia. Paradigma pembangunan pada masa Orde Baru yang cenderung *top-down*, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut mengalami perubahan orientasi menjadi pembangunan yang lebih memberikan ruang gerak dengan mengedepankan potensi dan inisiatif lokal (Arsyad, 1999: 119). Konsep baru yang ditawarkan berupa Otonomi Daerah, menitikberatkan manajemen pengembangan pada wilayah kabupaten/kota. Azas desentralisasi merupakan pilar utama UU tersebut menjadi legalitas formal bagi masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan sumberdaya lokal yang dimilikinya.

Salah satu isu yang banyak berkembang di daerah misalnya, inisiatif daerah untuk melakukan pemekaran, penggabungan dan pembentukan wilayah baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000 (PP No.129/2000)². Banyak alasan yang mendorong daerah-daerah tersebut melaksanakan PP No.129/2000, diantaranya karena faktor geografis, historis dan politis. Langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing wilayah setelah dilakukan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah adalah membentuk format pengembangan wilayah yang baru. Dalam upaya itulah masyarakat beserta institusi yang ada perlu melakukan identifikasi sumber-sumber potensial dan strategis guna pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di wilayahnya.

Sebagai konsekuensi bagi wilayah yang mengalami pemekaran, pembentukan dan penggabungan, secara tidak langsung akan berhadapan dengan permasalahan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah pasca pemekaran biasanya muncul dalam dua dimensi; (1) pengembangan pada wilayah yang kaya sumberdaya dan; (2) pengembangan pada wilayah yang miskin sumberdaya. Dari dua dimensi tersebut,

¹ Esensinya mengatur tentang *power sharing* dan *financial sharing* antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

² Mengatur tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

permasalahan sering muncul pada wilayah yang memiliki sumberdaya terbatas, dengan karakteristik kemiskinan yang tinggi dan didominasi oleh lapangan usaha pertanian. Meskipun demikian, daerah tetap dituntut agar memperoleh sumber finansial yang mencukupi untuk melanjutkan pembangunan, sementara hal tersebut akan sulit diperoleh dari lapangan usaha pertanian. Oleh karena itu diperlukan adanya pemikiran strategis untuk mengembangkan sumberdaya pertanian sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan.

Demikian yang dialami oleh Kabupaten OKU Timur, sejak tanggal 7 Januari 2004 wilayah yang merupakan bagian Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah resmi menjadi kabupaten. Pengukuhan pembentukan Kabupaten OKU Timur didasarkan pada UU No.37/2003 yang diresmikan oleh Mendagri atas nama Pemerintah RI. Menurut Mendagri³, sebagian besar kabupaten yang terbentuk belum menunjukkan kesiapan prasarana dan sarana untuk penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu sesuai hasil kajian tim ahli yang dibahas dalam sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), hanya tiga kabupaten yang memenuhi kriteria kelulusan, yaitu: Pasaman Barat, Minahasa Utara, dan Serdang Bedagai. Selebihnya merupakan daerah yang kurang berpotensi sehingga dilepaskan oleh kabupaten induk. Pernyataan Mendagri tersebut merupakan tantangan bagi Kabupaten OKU Timur untuk membuktikan kemampuannya dalam mengemban pembangunan wilayah pasca pemekaran.

TABEL I.1
PENGESAHAN KABUPATEN OKU TIMUR TANGGAL 7 JANUARI 2004

NAMA KABUPATEN BARU	IBUKOTA	KABUPATEN INDUK	PROPINSI	UNDANG-UNDANG
OKU Timur	Martapura	Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	No.37/2003
OKU Selatan	Muaradua	Ogan Komering Ulu		
Ogan Ilir	Indralaya	Ogan Komering Ilir		

Sumber : www.tempointeraktif.com "7 Januari, Mendagri Resmikan 24 Kabupaten Baru" tanggal 25 Maret 2004.

Sebagai kabupaten yang baru terbentuk, OKU Timur memiliki tantangan terutama berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya guna menopang pembangunan selanjutnya. Apabila melihat ketersediaan sumberdaya di OKU Timur, produk unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah hasil-hasil pertanian khususnya pertanian tanaman

³ www.kompas.com 'Mulai Dibahas, 13 RUU tentang 24 Daerah Otonom', Rabu, 12 November 2003.

pangan dan perkebunan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya kontribusi sektor pertanian (56%) terhadap total PDRB Kabupaten OKU Timur. Dari total tersebut didominasi oleh sub sektor pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama padi sementara yang terkecil adalah tanaman perkebunan dengan dominasi kelapa sawit dan karet.

Komoditas padi (pertanian lahan basah) merupakan spesifikasi aktivitas pertanian yang tidak dimiliki oleh dua kabupaten lain (OKU dan OKU Selatan). Komoditas padi merupakan kompetensi inti yang dimiliki oleh OKU Timur sebagai kekuatan pengembangan. Sementara kelapa sawit dan karet (pertanian lahan kering) dimiliki oleh kabupaten lain, tetapi OKU Timur memiliki potensi pengembangan lahan kering yang tidak

kalah dengan kabupaten lain. Jadi sebenarnya isu permasalahannya terletak pada optimalisasi aktivitas pertanian tanaman pangan (padi) dan perkebunan (kelapa sawit dan karet) sebagai salah satu modal dasar pengembangan OKU Timur pasca pemekaran.

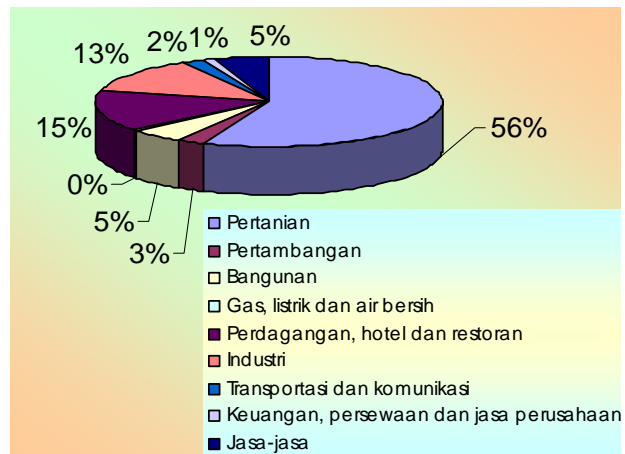
1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh OKU Timur saat ini dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) aspek penting. *Pertama*, masalah kebutuhan pemenuhan sumber pendapatan daerah; *kedua*, masalah kebijakan pengembangan pertanian yang akan diterapkan. Kedua permasalahan tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

a). **Kesulitan dalam mencari sumber pendapatan daerah**

Sebagai wilayah yang baru terbentuk dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi, tuntutan paling mendasar adalah pemenuhan anggaran keuangan daerah terutama pos anggaran Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Pemenuhan anggaran daerah tersebut harus dapat dicapai guna pembiayaan keberlanjutan pembangunan.

GAMBAR 1.1
PROPORSI PDRB DI OKU TIMUR TH. 2000



Sumber : Pemkab OKU dalam rangka pemekaran tahun 2002.